



Kejati Sita Tanah Seluas 835 Meter di Tahura

DENPASAR, TRIBUN BALI - Pasca menetapkan dua tersangka yaitu pemilik sekaligus orang yang menjual tanah I Wayan Suwirta dan I Wayan Sunarta, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi akan menyita lahan seluas 835 meter persegi. Lahan taman hutan rakyat (tahura) ini berada di Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan.

Rencananya, penyidik akan memasang plang penyitaan di atas lahan seluas 835 m2 yang di atasnya sudah berdiri kantor salah satu bank pada pekan ini. Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar mengatakan, saat dilakukan penyidikan obyek barang bukti yaitu berupa tanah sudah dilakukan penyitaan.

"Secara formil sudah dilakukan penyitaan sesuai penetapan pengadilan, namun untuk pemasangan plang sita akan dipasang hari Jumat lusa," terangnya, Rabu (2/8). Ditanya, dengan dilakukannya penyitaan terhadap objek barang bukti (tanah) apakah juga dilakukan pengosongan?. Edwin mengatakan, tidak akan ada eksekusi pengosongan bangunan yang berdiri di atasnya.

"Kami hanya akan memasang plang penyitaan dari Kejaksaan. Setidaknya ada pemberitahuan bahwa lokasi ini masih dalam pengawasan, agar pihak-pihak yang menguasai di situ tahu bahwa tanah tersebut statusnya menjadi barang bukti," jelasnya.

Ditanya soal keberadaan sertifikat lahan seluas 835 m2 yang dijual oleh tersangka I Wayan Suwirta, pihaknya mengatakan sudah ditangan penyidik. "Untuk sertifikat sudah diamankan saat penyidikan, dan dokumen jual belinya sudah disita," jawab Edwin.

Pantauan di lokasi, lahan seluas 835 m2 sudah berdiri bangunan lantai IV yang digunakan sebagai kantor salah satu bank. Dalam kasus penyerobotan lahan ini, Kejati Bali sudah menetapkan Suwirta dan Sunarta sebagai tersangka dalam kasus penyerobotan aset Tahura berupa lahan seluas 835 m2 yang terletak di By Pass Ngurah Rai Setetan, Denpasar Selatan.

"Tersangka IWS mengajukan dokumen kepemilikan tanah yang dimohonkan di BPN Denpasar yang seolah-olah tanah

itu miliknya. Sehingga terbitlah SHM No. 9362 atas nama IWS seluas 835 meter persegi lokasinya di Denpasar Selatan," terang Aspidus Kejati Bali, Polin Sitanggang, kala itu.

IWS kemudian menjual ke pihak lain. "Artinya bukan pemilik Tahura yang menjual, tapi masyarakat swasta yang mengaku sebagai pemilik menjual kepada masyarakat lain. Kalau untuk harga jual, tahun 2008 dijual Rp 3 miliar. Kalau sekarang lebih dari itu," jelasnya.

Apa ada keterlibatan BPN Denpasar? Pihaknya menyatakan ada yang terlibat. "Ada. Kami akan kejar. Di angangan kami sudah ada tersangka (BPN). Kalau alat bukti sudah kuat dan mendukung ke si A kami arahkan ke si A. Tapi kalau tidak, ya jangan," terangnya. (can)



TRIBUN BALI/I PUTU CANDRA

TANAH NEGARA - Obyek barang bukti tanah seluas 835 meter yang disita Kejati dalam kasus penyerobotan lahan negara di Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan.

Edisi : Kamis, 3 Agustus 2012

Hal : 5



Japa Tak Yakin dr Made N Korupsi

Alkes RSUD Badung Hasil Korupsi Masih Berfungsi

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Semua alat kesehatan (alkes) dari kasus korupsi yang dilakukan oleh tiga tersangka yakni dr I Made N, I Ketut SKTY (48), dan MYK (42) hingga saat ini masih berfungsi dengan baik di RSUD Badung. Alkes tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan pasien.

Alat medis tersebut di antaranya bedah tulang, bedah saraf, mobil ambulans untuk pasien jantung dan mobil ambulans siaga bencana. Pengadaan alkes tahun anggaran 2013 ini diduga telah merugikan negara senilai Rp

BERSAMBUNG ► HAL 7

Japa Tak Yakin...

6,28 miliar akibat perbuatan tiga tersangka.

Kepala Seksi Humas SIM dan Rekam Medis RSUD Mangusada Badung, dr I Ketut Japa, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/8) kemarin, membenarkan pengadaan alkes tersebut tahun 2013. Untuk pengadaan alat kesehatan saat itu belum menggunakan sistem pengadaan barang dan alkes dengan sistem e-katalog seperti saat ini.

"Saya tidak tahu berapa jumlah anggaran biaya pengadaan alkes. Meskipun saat itu saya masih menjabat sebagai staf pelayan rumah sakit. Namun saat itu pengadaan sudah sesuai prosedural dan aturan yang berlaku," ungkap dokter Japa.

Dikatakan dr. Japa, pengadaan alkes saat itu dilakukan pada tahun 2013 memang per set (komplit). Misalkan untuk alkes operasi bedah tulang, komponen alat medis yang dibeli khusus untuk ortopedi satu set. Sementara untuk mobil ambulans jantung lengkap dengan piranti alkes. Mobil ambulans jantung tersebut khusus disiapkan dari pihak rumah sakit untuk pasien jantung.

Selain itu, dokter dan perawatnya pun disiapkan khusus untuk mobil ambulance jantung tersebut. Biasanya, mobil ambulans ini digunakan untuk acara saat Presiden RI



TRIBUN BALI/HISYAM MUDIN

AMBULANS - Dua mobil ambulans yang merupakan hasil korupsi pengadaan alkes terparkir di RSUD Mangusada, Badung, Rabu (2/8).

melakukan kunjungan ke Bali. Sedangkan untuk mobil ambulans yang satunya disiapkan untuk siaga bencana.

"Saya tegaskan semua alat kesehatan yang dibeli tahun 2013 masih berfungsi. Hanya saja untuk dua mobil ambulans pengadaan 2013 dan keluarnya di tahun 2014," jelasnya.

Saat disinggung soal anggaran biaya dan permainan harga untuk pengadaan alat kesehatan seperti yang disangkakan kepada para tersangka, Japa mengatakan tidak tahu. "Kalau soal itu saya tidak tahu," tegasnya sekali lagi.

Terkait dr Made N yang saat ini masih jalani pemeriksaan oleh Polda Bali, Japa tak pe-

caya pejabat di RSUD Badung itu ikut melakukan korupsi. Japa mengenal dr Made N seorang pekerja ulet.

"Mungkin beliau tidak ada maksud apa-apa. Dia pekerja keras jadi mungkin tidak ada niat ke sana. Apalagi untuk korupsi," ucapnya.

Dikatakan Japa, dr Made N mulai bekerja sebagai pegawai rumah sakit sejak tahun 1994. Kala itu RSUD Badung belum berdiri.

"Dulu sebelum RSUD Mangusada, di sini itu klinik yakni Surya Darma Asih. Nah, dia bekerja di klinik itu. Kemudian di tahun 2002 barulah didirikan RSUD Mangusada. Saat itu juga beliau pun bekerja di

rumah sakit ini (RSUD Mangusada). Selanjutnya baru menjabat sebagai kepala bidang pelayanan. Dia pekerja keras," terangnya.

Untuk menghindari dan mencegah kasus korupsi terulang di RSUD Badung, Japa mengatakan pihak rumah sakit akan berupaya melakukan pengawasan ketat. "Kami akan menggandeng badan pemeriksa keuangan (BPK), BPKP, dan instansi lainnya," imbuhnya.

Selanjutnya untuk pengadaan barang dan alat kesehatan, sesuai dengan instruksi dari Bupati Badung, mau tidak mau harus melalui sistem e-katalog. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi terulang kembali.

Pantauan *Tribun Bali* kemarin, dua mobil ambulans yang masuk dalam kasus korupsi pengadaan alkes terparkir di RSUD Badung. Dua mobil ambulans tersebut satu khusus untuk pasien jantung dan satunya lagi mobil ambulans siaga bencana.

Kedua ambulans tersebut juga masih lengkap dengan piranti kesehatan yakni alat gas tabung oksigen, alat monitor pedektaksi defak jantung, dan alat lainnya. Selain itu, alat kesehatan seperti bedah tulang dan bedah saraf pun dilaporkan masih berfungsi dan digunakan di masing-masing poliklinik. (opu)

● DARI HALAMAN 1

Edisi : Kamis 3 Agustus 2017

Hal : 1 dan 7